



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.22/M.PPN/HK/02/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGELOLAAN PENDANAAN
HIBAH LUAR NEGERI UNTUK PENANGGULANGAN BENCANA
DALAM *INDONESIA DISASTER FUND*

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah dan mitra pembangunan dalam penanggulangan bencana dan upaya pengurangan risiko bencana yang bersumber dari pendanaan dari negara/lembaga donor, diperlukan peningkatan koordinasi pendanaan melalui mekanisme yang cepat dimobilisasi, fleksibel, transparan dan akuntabel bersama dengan kementerian/lembaga terkait;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melaksanakan kegiatan koordinasi strategis pengelolaan pendanaan hibah luar negeri untuk penanggulangan bencana dalam *Indonesia Disaster Fund* (IDF).
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Pendanaan Hibah Luar Negeri untuk Penanggulangan Bencana dalam *Indonesia Disaster Fund*;
- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Pendanaan Hibah Luar Negeri untuk Penanggulangan Bencana dalam *Indonesia Disaster Fund*,

Mengingat : ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
 3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
 7. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018;
 8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
 9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGELOLAAN PENDANAAN HIBAH LUAR NEGERI UNTUK PENANGGULANGAN BENCANA DALAM *INDONESIA DISASTER FUND*.**

PERTAMA : ...

- ~~PERTAMA~~ : Membantu Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Pendanaan Hibah Luar Negeri untuk Penanggulangan Bencana dalam *Indonesia Disaster Fund* untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis IDF, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Strategis IDF terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas:
- a. memberikan arahan dan melakukan koordinasi kepada Tim Pelaksana; dan
 - b. melaksanakan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pelaksana.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. menyusun kebijakan umum dan rencana kerja Tim Koordinasi Strategis IDF;
 - b. menyusun konsep program/kegiatan Pengelolaan Pendanaan Hibah Luar Negeri untuk Penanggulangan Bencana dalam IDF;
 - c. melakukan koordinasi di tingkat pusat dan daerah dalam pelaksanaan program/kegiatan Pengelolaan Pendanaan Hibah Luar Negeri untuk Penanggulangan Bencana dalam IDF;
 - d. melakukan koordinasi perencanaan dan penetapan alokasi dana dan persetujuan penyaluran anggaran tahunan program;
 - e. melakukan pemantauan pelaksanaan rencana dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Pengelolaan Pendanaan Hibah Luar Negeri untuk Penanggulangan Bencana dalam IDF bersama-sama dan melaporkannya kepada Penanggung Jawab; dan
 - f. menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan Tim Koordinasi Strategis IDF kepada Tim Pengarah melalui Penanggung Jawab Kegiatan.
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
 - b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.

KETUJUH : ...

- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis IDF dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2018.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Februari 2018

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.22/M.PPN/HK/02/2018
TANGGAL 20 FEBRUARI 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGELOLAAN PENDANAAN HIBAH LUAR NEGERI
UNTUK PENANGGULANGAN BENCANA DALAM *INDONESIA DISASTER FUND*

A. TIM PENGARAH

Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
Anggota : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.

B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Pengembangan Regional,
Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

Ketua : Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan
Perdesaan, Kedeputian Bidang Pengembangan
Regional, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota : 1. Direktur Pendanaan Luar Negeri
Multilateral, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Direktur Pendanaan Luar Negeri Bilateral,
Kementerian PPN/Bappenas;
3. Kepala Biro Perencanaan, Badan Nasional
Penanggulangan Bencana;
4. Kepala Biro Hukum dan Kerjasama, Badan
Nasional Penanggulangan Bencana;
5. Direktur Pinjaman dan Hibah, Direktorat
Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan
Risiko, Kementerian Keuangan;
6. Direktur Pemulihan dan Peningkatan Sosial
Ekonomi, Badan Nasional Penanggulangan
Bencana;
7. Dr. Ir. Suprayoga Hadi, MSP, Kementerian
PPN/Bappenas;
8. Dra. Hindun Barokah, MA, Direktorat
Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan
Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;

9. *Arief Wiroyudo, S.Kom, MT, MPP*, Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
10. *Diah Lenggogeni, ST, M.Sc*, Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
11. *Ir. Kuswiyanto, M.Si*, Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
12. *Ir. Hermani Wahab, M.Sc*, Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
13. *Tasliman Solihin, ST, MP*, Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
14. *Citra Sawita Murni, SE, MSE, MA*, Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
15. *Rayi Paramita, SP, MT*, Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
16. *Aruminingsih, S.Si, M.Sc*, Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
17. *Erna Gustina Norrista, SP, M.Sc*, Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
18. *Syifaa Tresnaningrum, ST, M.Sc*, Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
19. *Andhika Rizal Pramudia, SE*, Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
20. *Dwita Widyaningsih, ST*, Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas.

- D. TENAGA PENDUKUNG** : 1. Ade Nurani Sandarus, Kementerian PPN/
Bappenas;
2. Mira Berlian, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Samsudin, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati